**BAB II**

**PELAKSANAAN SUPERVISI PENGAWAS**

**PADA PEMBELAJARAN**

**A. Pelaksanaan Supervisi Pengawas**

*1. Pengertian Pelaksanaan*

Di dalam kamus besar Indonesia disebutkan bahwa pelaksanaan semakna dengan implementasi atau penerapan.[[1]](#footnote-2) Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan guru. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada guru, agar pelaksanaan dapat efektif harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tim Pakar Manajemen Pendidikan berpendapat, bahwa supervisi tidak berhenti pada selesainya pemberian bantuan dan terlaksananya tekhnik supervisi, melainkan ada *follow up* untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi, sehingga kegiatan evaluasi perlu dilaksanakan.[[2]](#footnote-3)

 Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan supervisi adalah mencakup persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.[[3]](#footnote-4)

*2. Pengertian Supervisi*

Istilah supervisi pendidikan dapat dijelaskan baik menurut asal usul(*etimologi*), bentuk perkataan(*morfologi*), maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu(*semantik*). Ditinjau dari sudut etimologi “supervisi” berasal dari kata “super” dan “vision” yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologi supervisi berarti penglihatan dari atas.[[4]](#footnote-5) Supervisi biasanya digunakan sebagai istilah pengawasan. Hendayat Soetopo mengungkapkan bahwa pengawas dapat mengandung arti beragam di dalamnya dapat berisi inspeksi, control dan evaluasi dalam proses manajemen. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen.[[5]](#footnote-6) Lebih lanjut diungkapkan bahwa dalam istilah manajemen, pengawasan lebih banyak diterjemahkan dari *“controlling”* dalam Inggris daripada “*inspecting”* dan *“evaluating”* disamping control itu sendiri.[[6]](#footnote-7) Oleh N.A. Ametembun diungkapkan bahwa istilah supervisi diambil dari perkataan Inggris *“supervision”* artinya pengawasan .[[7]](#footnote-8) Sedangkan orang yang melakukan supervisi disebut *supervisor.* Seorang supervisor memang mempunyai posisi diatas atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang di supervisinya, tugasnya adalah melihat, menilik atau mengawasi orang-orang yang disupervisinya.

 Secara terminology selain pengertian dari kata supervisi sendiri, juga arti supervisi dipakai sebagai supervisi pengajaran atau supervisi pendidikan. Penggandengan kata supervisi dengan pengajaran atau pendidikan memfokuskan kegiatan supervisi kepada kegiatan pengajaran dalam proses pembelajaran. Dari sudut ini dapat juga diungkapkan beberapa definisi dari berbagai para ahli tentang supervisi pendidikan sebagai bahan perbandingan(*komparatif*).

 Wiles dan Amentembun merumuskan bahwa supervisi sebagai bantuan dalam pengembangan situasi mengajar dan belajar yang lebih baik.[[8]](#footnote-9) Bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang bersifat material maupun moral yang diberikan secara terus menerus sesuai dengan proses dan taraf perkembangannya.

 Neagley dan Evans mendefinisikan supervisi pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pendidikan, dan kurikulum.[[9]](#footnote-10)

 Glickman mengungkapkan bahwa supervisi pengajaran adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran.[[10]](#footnote-11)

 Sedangkan Amentembun mendefinisikan supervisi pendidikan dari rumusan Adams dan Dickey bahwa supervis adalah pelayanan pembinaan kearah perbaikan pada situasi pendidikan. Pembinaan yang dimaksud berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan(termasuk pengajaran) pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. N.A. Amentembun mengungkapkan, bahwa setelah menelaah berbagai definisi supervisi, maka dapat merumuskan supervisi pendidikan sebagai “Pembinaan kearah perbaikan situasi pendidikan. Pembinaan dimaksud berupa bimbingan atau tuntutan kearah perbaikan situasi pendidikan termasuk pengajaran pada umumnya dan meningkatkan mutu mengajar dan belajar pada khususnya.[[11]](#footnote-12)

 Supervisi diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membawa guru (orang yang dipimpin) agar menjadi guru atau personel yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, selain itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah.[[12]](#footnote-13)

 Jadi supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar, agar memperoleh kondisi yang lebih baik, sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan obyektif tentang situasi pendidikan, meskipun tujuan akhirnya pada hasil belajar siswa, tetapi lebih diutamakan dalam supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan pada orang yang di supervisi yaitu guru dalam bidang pendidikan. Lain halnya dengan konsep kuno yang menyatakan bahwa supervisi itu dilaksanakan dalam bentuk”*inspeksi”* atau mencari kesalahan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya.

 Merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk melayani serta mengelola dalam supervisi yang erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pandangan al-Qur’an bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah swt. Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah swt, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

 Tanggung jawab seorang pemimpin sama halnya dalam supervisi sebagaimana dalam QS Al-maidah ayat 117, yang berbunyi;

مَا قُلۡتُ لَهُمۡ إِلَّا مَآ أَمَرۡتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۚ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّا دُمۡتُ فِيهِمۡۖ فَلَمَّا تَوَفَّيۡتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ١١٧

117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.

Adapun hadits yang menjelaskan tentang kepemimpinan yang berbunyi;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ( رواه البخا رى ومسلم )

 *Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya.(Bukhari, Muslim)*

 Hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertangung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan betanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, begitu pula seorang supervisor yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena itu seorang supervisor seharusnya memberikan bantuan, pelayanan dan pembinaan serta mencarikan jalan keluar jika ada permasalahan bagi bawahannya.

 Berdasarkan uraian-uraian dari pengertian tersebut di atas, tentunya supervisi sangat punya peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari sudut organisasi atau kegiatan. Hal ini sebagaimana penjelasan kerangka berpikir yang digunakan sebagai berikut :

*3. Tujuan dan Misi Supervisi Pendidikan*

Tujuan umum supervisi pendidikan adalah perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya, dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Sedangkan tujuan khusus supervisi pendidikan adalah sebagai berikut;

1. Membantu guru untuk lebih memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan itu.
2. Membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan dan kesulitan murid untuk menolong mereka untuk mengatasinya.
3. Memperbesar kesanggupan guru-guru untuk melengkapi dan mempersiapkan murid-muridnya menjadi masyarakat yang epektif.
4. Membantu guru mengadakan diagnose secara kritis aktivitas-aktivitasnya, serta kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid-muridnya, dan menolong mereka merencanakan perbaikan.
5. Membantu guru-guru untuk dapat menilai aktivitas-aktivitasnya dalam rangka tujuan perkembangan anak didik.
6. Memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demikratis dan kooperatif serta memperbesar kesediaan untuk saling tolong menolong.
7. Memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesi keahliannya.
8. Membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalamannya sendiri.
9. Membantu untuk lebih mempopulerkan sekolah kepada masyarakat agar bertambah simpati dan kesediaan masyarakat untuk menyokong sekolah.
10. Melindungi guru dan tenaga pendidikan terhadap tuntutan yang tak wajar dan kritik yang tidak sehat dari masyarakat.[[13]](#footnote-14)

Adapun misi utama supervisi pendidikan adalah memberikan pelayanan

kepada guru untuk mengembangkan mutu pembelajaran, memfasilitasi guru agar

dapat mengajar dengan efektif . Melakukan kerjasama dengan guru atau anggota

staf lainnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan kurikulum

serta meningkatkan partumbuhan profesionalitas semua anggotanya.[[14]](#footnote-15)

*4. Prinsip-prinsip Supervisi Pendidikan*

Pelaksanaan supervisi pendidikan memiliki prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip supervisi itu, oleh Hendayat Soetopo menyebutkan tujuh prinsip supervisi, menurut Hendayat Soetopo, diantaranya:[[15]](#footnote-16)

1. Prinsip organisasional, artinya pengawasan dapat dilakukan dalam kerangka struktur organisasi yang melingkupinya.

2. Prinsip perbaikan, artinya pengawasan berusaha mengetahui kelemahan atau kekurangan, kemudian dicari jalan pemecahan agar manajemen dapat berjalan sesuai dengan standar dan organisasi dapat mencapai tujuan.

3. Prinsip komunikasi, artinya pengawasan dilakukan untuk membina sistem kerjasama antara atasan dan bawahan, membina hubungan baik antara atasan dan bawahan dalam proses pelaksanaan pengelolaan organisasi.

4. Prinsip pencegahan, artinya pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengelola komponen-komponen organisasi.

5. Prinsip pengendalian, artinya pengawasan dilakukan agar semua proses manajemen berada pada rel yang telah digariskan sebelumnya. Dalam hal ini, prinsip efisien, efektif dalam manajemen menjadi ukuran.

6. Prinsip objektif, artinya pengawasan dilakukan berdasarkan data nyata di lapangan tanpa menggunakan penilaian dan tafsiran subjektif pengawas.

7. Prinsip kontinyuitas, artinya pengawasan dilakukan secara terus menerus baik selama berlangsung proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan kerja.

 Secara sederhana prinsip-prinsip Supervisi adalah sebagai berikut :

1. Supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang di supervisi
2. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif.
3. Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebanarnya.
4. Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana.
5. Dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi.
6. Supervisei hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi dan sikap pihak yang di supervisi.
7. Supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri tidak tergantung pada kepala sekolah. [[16]](#footnote-17)

*5. Teknik dan Metode Supervisi pendidikan*

Untuk mencapai tujuan supervisi pendidikan, seorang supervisor dapat menggunakan berbagai tekhnik dan metode. Oleh karena itu, ada teknik-teknik supervisi yang dikemukakan berdasarkan para ahli. B. Suryobroto mengungkapkan bahwa teknik-teknik supervisi itu adalah : (1) Kunjungan kelas, (2) Observasi kelas , (3) Percakapan dari kegiatan guru, (4) saling kunjung-mengunjungi meliputi; musyawarah, rapat, lokakarya dan karyawisata, (5) Brosur, (6) Pengumuman, (7) Edaran dan (8) memanfaatkan mass media.[[17]](#footnote-18)

Piet A. Sahertian *et.al* menyebutkan bahwa teknik supervisi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) teknik supervisi yang bersifat individu dan (2) teknik supervisi yang bersifat kelompok diuraikan sebagai berikut :[[18]](#footnote-19) ia menjelaskan bahwa (1) teknik supervisi yang bersifat individu, meliputi; kunjugan ke kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas, menilai diri sendiri dan (2) teknik supervisi yang bersifat kelompok, meliputi; pertemuan orientasi bagi guru baru, panitia penyelenggara, rapat guru, studi kelompok antara guru, diskusi sebagai proses kelompok, tukar menukar pengalaman, lokakarya, diskusi, seminar, symposium, *demonstration teaching*, Perpustakaan jabatan, bulletin supervisi, membaca langsung, mengikuti kursus, organisasi jabatan, *curriculum laboratory*, perjalanan sekolah untuk staf sekolah.”

Sedangkan yang termasuk metode supervisi ada dua yaitu metode langsung dan tidak langsung. Adapun uraiannya sebagai berikut;

1. Metode langsung *(direct method*) merupakan suatu cara pendekatan langsung terhadap sasaran supervisi. Seorang supervisor secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi baik secara individu maupun kelompok.
2. Metode tidak langsung (*indirect method*) yaitu supervisor tidak berhadapan langsung dengan orang yang disupervisi, tetapi menggunakan berbagai alat atau media komunikasi, misalnya melalui perantara kepala sekolah atau melalui alat seperti handpone, televis atau papan pengumuman dan sebagainya.[[19]](#footnote-20)

*6. Jenis-jenis Supervisi pendidikan*

Adapun menurut Hendayat Soetopo dalam bahan kuliah manajemen pendidikan pada Pascasarjana UIN Malang mengungkapkan bahwa pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain :[[20]](#footnote-21)

1. Berdasarkan sudut pandang organisasi, dibagi menjadi :

 1) Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap unit-unit kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya Kandepdiknas Kotamadya/Kabupaten, Kanwil, dan Inspektorat di Depdiknas mengawasi sekolah, perguruan tinggi dan jajaran Depdiknas.

 2) Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yagn dilakukan oleh pihak jajaran organisasi, misalnya BPK memeriksa pelaksanaan anggaran di Kanwil, Depdiknas.

2. Berdasarkan sudut pandang waktunya, pengawasannya dibagi menjadi :

 1) Pengawasan kontinyu, artinya pengawasan yang dilakukan secara terus menerus selama berlangsungnya kegiatan. Hal ini dilakukan oleh pengawas sebagai kegiatan rutin sehari-hari.

 2) Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, misalnya bulanan, dwiwulan, triwulan, dan seterusnya.

 3) Pengawasan temporer, artinya pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keperluan.

3. Berdasarkan sudut pandang substansinya, pengawasan dibagi menjadi :

 1) Pengawasan bidang personil (ketenagaan)

 2) Pengawasan dibidang sarana dan prasarana

 3) Pengawasan bidang akademik, termasuk kurikulum

 4) Pengawasan bidang operasional/proses kerja

 5) Pengawasan bidang kesiswaan

 6) Pengawasan dibidang keuangan

 7) Pengawasan bidang hubungan dengan masyarakat.

*7. Gaya/Tipe Kepemimpinan Supervisi*

Untuk melaksanakan fungsi supervisi, seorang supervisor pendidikan dapat memperlihatkan berbagai gaya atau tipe kepemimpinan supervisi. N.A. Amentembun menyebutkan bahwa gaya atau cara supervisi dibedakan menjadi empat macam gaya dasar pendidikan atau pengajaran, yaitu: (1) supervisi yang otokratis, (2) supervisi yang demokratis, (3) supervisi yang *Laissez-Faire,* (4) supervisi yang manipulasi diplomatic. Gaya-gaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :[[21]](#footnote-22)

1. Supervisi yang otokratis

 Supervisi yang otokratis menganggap bahwa fungsinya adalah menentukan sendiri segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan bagaimana harus dilaksanakan oleh orang-orang yang harus disupervisinya. Ia pun dengan seksama mengawasi bagaimana keinginannya itu dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang disupervisi dengan sebaik-baiknya.

2. Supervisi yang demokratis

 Supervisor yang demokratis, yakin fungsinya adalah membina orang-orang yang disupervisi, menentukan bersama apa yang akan dikerjakan, memikirkan bersama prosedur dan cara-cara pelaksanaannya, dan bekerjasama mewujudkan rencana-rencana yang telah ditetapkan bersama, serta menilai bersama hasil-hasil yang dicapai.

3. Supervisi yang *Laissez-Faire*

 Seorang supervisor yang *laissez-faire* menginterprestasi supervisi yang demokratis dengan memberikan kebebasan, keleluasaan kepada orang-orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Supervisor yang *laissez-faire* sikapnya apatis, masa bodoh, acuh tak acuh, dan mempercayakan saja segala sesuatu kepada orang-orang yang disupervisi untuk melakukannya. Segala sesuatu diserahkan dan terserah kepada orang-orang yang disupervisi untuk melakukannya.

4. Supervisi yang manipulasi diplomatik

 Seorang supervisor yang manipulasi diplomatik mengartikan supervisi yang demokratis sebagai *directing* yakni memberi pengarahan kepada orang-orang yang disupervisi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki supervisor dengan cara-cara manipulasi (muslihat yang halus).

*8. Ragam Supervisi pendidikan*

Dalam proses pelaksanaan supervisi seorang supervisor dapat memperlihatkan berbagai corak atau ragam. Untuk itu N.A. Ametembun mengungkapkan bahwa corak atau ragam khusus supervisi dalam proses supervisi itu adalah:[[22]](#footnote-23)

a. Supervisi yang korektif

 Dalam proses supervisinya, supervisor lebih bersifat mencari kesalahan-kesalahan yang mungkin diperbuat oleh orang-orang yang disupervisi.

b. Supervisi yang preventif

 Dalam proses supervisinya, supervisor berusaha mencegah hal-hal yang tidak diinginkannya. Kadang-kadang supervisor mendahului memberi nasihat-nasihat.

c. Supervisi yang konstruktif

 Proses supervisi ini tidak mencari kesalahan-kesalahan yang diperbuat kecuali bila telah ditemukakannya suatu gagasan guna memperbaiki kesalahan tersebut.

d. Supervisi yang kreatif

 Dalam proses supervisi ini, supervisor menekankan pada inisiatif dan kebebasan mencipta serta memanfaatkan segala dana, sarana dan tenaga yang disupervisi untuk mewujudkan tujuan-tujuan supervisi sesuai dengan bakat, minat dan kesanggupan masing-masing.

e. Supervisi yang kooperatif

 Dalam proses supervisi ini, supervisor yang kooperatif senantiasa mementingkan kerjasama dengan orang-orang yang disupervisi.

*9. Langkah-langkah Supervisi Pendidikan*

Berdasarkan buku paduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dijelaskan bahwa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan supervisi/pengawasan sekolah mencakup persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut .[[23]](#footnote-24) Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Persiapan

 Kegiatan persiapan yang perlu dilakukan adalah menyusun program dan organisasi supervisi, dalam supervisi hendaknya mencerminkan tentang jenis kegiatan, tujuan dan sasaran pelaksanaan, waktu dan instrument. Sedangkan dalam organisasi supervisi tercermin mekanisme pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan tindak lanjut. Untuk itu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan supervisi hendaknya pengawas melibatkan/ berkoordinasi dengan pejabat struktur terkait, kepala sekolah/ madrasah, guru dan lainnya.

2. Pelaksanaan

 Hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian pengawas dalam melaksanakan kegiatan supervisi, baik di sekolah umum maupun di madrasah adalah :

 a. Supervisi hendaknya dilakukan secara berkesinambungan.

 b. Supervisi hendaknya dilakukan pada awal dan akhir catur wulan, hal tersebut dimaksudkan sebagai bahan perbandingan.

 c. Pengawas terampil dalam menggunakan instrument.

 d. Mampu mengembangkan instrument supervisi.

 e. Supervisi bukan mencari kesalahan dan bukan pula menggurui, tetapi bersifat pemecahan masalah untuk mencari solusi.

 f. Supervisi hendaknya mencakup segi teknis kependidikan dan teknik administrasi.

 g. Pengawas hendaknya menguasai substansi materi yang disupervisi dan melengkapi diri dengan berbagai instrument yang dibutuhkan.

 h. Karena supervisi bersifat pembinaan, maka para supervisor harus memiliki kemampuan profesional dan wawasan yang luas tentang pendidikan agama Islam.

 i. Dalam pelaksanaan supervisi prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi) hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

3. Penilaian dan Tindak Lanjut

 a. Penilaian. Penilaian yang dimaksud dalam kaitan ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi meliputi keterbacaan dan keterlaksanaan program supervisi, keterbacaan dan kemantapan instrument, hasil supervisi, dan kendala yang dihadapi.

 b. Tindak lanjut. Adapun tindak lanjut dari kegiatan supervisi antara lain : langkah-langkah pembinaan, program supervisi selanjutnya.

 Senada juga diungkapkan Ahmad Azhari bahwa tindak lanjut supervisi itu ada dua cakupan; (1) langkah-langkah pembinaan, (2) program supervisi selanjutnya dengan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan pada awal dan akhir semester/akhir tahun.[[24]](#footnote-25)

**B. Kepengawasan Pendidikan Agama Islam**

*1. Pengertian pengawas*

Pengertian pengawas sering disinonimkan dengan istilah supervisor*.* Supervisor dalam bahasa Inggris berarti orang yang melaksanakan tugas supervisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Amentembun, orang yang melakukan supervisi pendidikan tersebut dikenal dengan *supervisor* atau pengawas pendidikan.

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, atau melihat sesuatu dengan cermat dan seksama.[[25]](#footnote-26) Selanjutnya menurut Prayudi, bahwa pengawasan itu adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendakai, direncanakan atau diperhatikan.[[26]](#footnote-27)

*2. Landasan Hukum Pengawas Pendidikan*

Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang amat penting, termasuk di dalamnya segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kepengawasan pendidikan menjadi hal yang urgen (penting), oleh karena itu ekstensi pengawas sekolah harus dinaungi oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

 Adapun dasar-dasar hukum yang menaungi kepengawasan pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XIX, pasal 66 tentang pengawas, menjelaskan: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan.

2. Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (SK Menpan) No. 118/1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007 tentang standar Pengawas Sekolah atau Madrasyah.

4. Keputusan Menteri Agama No. 381/1999 tentang Pertunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan angka kreditnya,

5. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah.

 Jika dilihat dari dasar hukum tentang kepengawasan tidak diragukan lagi bahwa tugas pengawas telah dituangkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian eksistensi pengawas sekolah merupakan tugas yang dilindungi oleh pemerintah.

*3. Tugas dan Fungsi Pengawas*

Tugas Kepengawasan pengawas pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah hanya terkait denga tugas kepengawasan akademik. Rincian kerja pengawas PAI sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam permenag No.2 tahun 2012 pasal 4, adalah sebagai berikut;[[27]](#footnote-28)

1. Menyusun program pengawasan mata pelajaran PAI;

 1. Setiap pengawas PAI, baik secara kelompok maupun perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri dari;

a. Program pengawasan tahunan

b. Program pengawasan semester

c. Rencana Kepengawasan Akademik (RKA)

 2 Program pengawasan tahunan pengawas PAI disusun oleh Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) PAI kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan kegiatan ini diperkirakan berlangsung selama satu minggu.

2. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian

1) Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas PAI dengan guru PAI binaannya.

 2) Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru PAI dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.

 3) Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan KKG/MGMP, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.

3. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan profesionalitas guru PAI

 1) kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI dilaksanakan secara berkelompok di KKG/MGMP paling sedikit tiga kali dalam satu semester atau disesuaikan dengan kondisi daerah.

 2) Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan.

 3) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI ini dapat dilakukan melalui *workshop*, seminar, oservasi individual, KKG/MGMP dan *grouf conference*, serta kunjungan kepada guru PAI melalui supervisi akademik.

4. Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan.

 1) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini lebih ditekankan pada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada setiap guru PAI binaan

 2) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan,

 3) Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan dilakukan oleh setiap pengawas PAI setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian, paling lambat satu minggu pada bulan berikutnya.

 Sedangkan fungsi pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 2012 adalah sebagai berikut;

1. Menyusun Program Pengawasan PAI

2. Pembinaan, Pembimbingan dan Pengembangan Profesi Guru PAI

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI

4. Penilaian HAsil Pelaksanaan program pengawasan dan

5. Pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan tugas kepengawasan.

Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (SN-PAI). Pelaksanaan program pengawasan meliputi; (1)melaksanakan pembinaan guru PAI,(2) memantau Standar Nasioanal Pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian, standard an standar kompetensi lulusan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru PAI.[[28]](#footnote-29)

Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran*.* Franseth Jane dan Anyermengemukakan, bahwa fungsi utama supervisi ialah membina program pengajaran yang sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan. Sedangkan menurut Briggs, bahwa fungsi utama supevisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru.[[29]](#footnote-30)

 Sedangkan menurut Syaiful Sagala bahwa supervisi pendidikan mempunyai fungsi penilaian(*evaluation*), yaitu penilaian kinerja guru dengan jalan penelitian(*research*) yaitu pengumpulan informasi dan fakta-fakta mengenai kinerja guru dengan cara melakukan penelitian.Kegiatan evaluasi dan research ini merupakan usaha perbaikan (*improvement)*, sehingga berdasarkan data dan informasi yang di peroleh oleh supervisor dapat dilakukan perbaikan kinerja guru sebagaimana mestinya dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dalam melaksanakan tugas mengajar.[[30]](#footnote-31)

 Oleh karena itu, supervisor pendidikan perlu memahami fungsi-fungsi supervisi dengan menghindari praktik-praktik pembinaan yang dapat membuat guru yang disupervisi merasa terkungkung dengan masalah yang dihadapinya.

*4. Peran Pengawas*

Pembinaan professional dilakukan karena satu alasan, yaitu pemberdayaan akuntabilitas profesional guru yang dapat pada gilirannya meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Untuk maksud tersebut Departemen Agama Republik Indonesia, para pengawas melakukan peranannya sebagai berikut :[[31]](#footnote-32)

1. Peneliti

 Seorang pengawas dituntut untuk mengenal dan memahami masalah masalah pengajaran.

2. Konsultan atau Penasehat

 Seorang pengawas hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran

3. Fasilitator

 Seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional baik material seperti buku dan alat pengajaran. Dengan kata lain, hendaknya menyediakan kemudahan-kemudahan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesional.

4. Motivator

 Seorang pengawas hendaknya membangkitkan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik, mendorong guru-guru untuk mempratekkan gagasan-gagasan baru yang dianggap baik bagi penyempurnaan proses belajar mengajar.

5. Pelopor Pembaharu

 Para pengawas hendaknya jangan merasa puas dengan cara-cara dan hasil yang dicapai, memiliki prakarsa perbaikan dan meminta guru melakukan hal serupa, tidak membiarkan guru mengalami kejenuhan dalam pekerjaannya, membantu guru-guru untuk menguasai kecakapan-kecakapan baru, dan mengembangkan program-program latihan dan pengembangan dengan cara merencanakan pertemuan atau penataran sesuai denan kebutuhan setempat melalui farum MGBS, MGMP dan PKG.

 Oleh Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru mengungkapkan bahwa seorang supervisor sesuai dengan pengertian hakiki dari supervisi itu sendiri, maka peranan supervisor ialah memberikan support *(supporting)*, membantu *(assisting)*, dan mengikutsertakan *(sharing)*.[[32]](#footnote-33) Artinya memberikan support berarti seorang supervisor dengan segala kemampuan memberikan kiat-kiat yang menjadi dorongan (motivasi) kepada seorang agar mau berbuat sesuatu, memberikan bantuan berarti pengetahuan pengalaman ide atau ketrampilan yang dimiliki supervisor mampu mengarahkan, menuntun, membina maupun membimbing seorang untuk bisa berbuat sendiri, sedangkan mengikut sertakan berarti supervisor turut serta terlibat langsung dalam menyelesaikan sesuatu. Sehingga memang peranan seorang supervisor ialah menciptakan suasana sedemikian rupa sehinga guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab.

*5. Perilaku Supervisor/Pengawas*

Supervisor sebagai Pembina profesional guru diwajibkan dalam perilaku para pengawas/supervisor sebagai Pembina. Mutu perilaku pembinaan tersebut bergantung pada pemahaman para pengawas mengenai tujuan pembinaan professional. Jika dianalisis, tingkat mutu perilaku pembinaan diwujudkan dalam 6 (enam) bentuk, yaitu :

1) Memperhatikan

2) Mengerti atau memahami

3) Membantu dan membimbing

4) Memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan

5) Memupuk kepercayaan diri, dan

6) Memupuk, mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreatifitas.[[33]](#footnote-34)

*6. Ciri-ciri Supervisor yang baik.*

Seseorang supervisor harus memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat seperti berikut:

1. Berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang berada dibawah perngawasannya.
2. Menguasai/memahami benar-benar rencana dan program yang telah digariskan yang akan dicapai oleh setiap lembaga atau bagian.
3. Berwibawa, dan memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik kepengawasan, terutama human relation.
4. Memiliki sifat-sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah, dan rendah hati.
5. Berkemauan keras, rajin bekerja demi tercapainya tujuan atau program yang telah digariskan/disusun. [[34]](#footnote-35)

*7. Kompetensi dasar seorang supervisor/pengawas*

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris”competence”yang berarti kecakapan dan kemampuan.[[35]](#footnote-36)Istilah kompetensi merupakan istilah yang sudah lazim di bidang pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.[[36]](#footnote-37)

 Kompetensi pengawas sekolah/madrasyah berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, terdiri atas 6 (enam) dimensi kompetensi untuk menjadi pengawas yang professional, setidaknya harus memiliki enam kompetensi, Kompetensi Kepribadian yang menyeluruh, kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Evaluasi Manajerial, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Sosial.[[37]](#footnote-38)

*8. Tanggung Jawab Seorang Supervisor*

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pidarta, bahwa setiap pekerjaan membutuhkan tanggung jawab (akuntabilitas), lebih-lebih untuk pekerjaan yang bersifat profesi, hal itu merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Pidarta menyebutkan bahwa secara terperinci tanggung jawab supervisor (pengawas) adalah sebagai berikut:[[38]](#footnote-39)

1. Mengorganisasi dan membina guru, yang mencakup:

 a. memotivasi dan meningkatkan semangat bekerja

 b. menegakkan disiplin dengan sanksi-sanksinya

 c. memberi konsultasi, memimpin diskusi, dan membantu pemecahan masalah

 d. memberi contoh prilaku yang diterapkan dalam kesupervisian

 e. ikut mengusahakan insentif guru-guru

 f. menegmbangkan profesi guru melalui belajar kelompok, dan penataran

 g. mengusahakan perpustakaan bagi guru-guru

 h. member kesempatan kepada guru-guru mengarang bahan pelajaran sendiri

2.Mempertahankan dan mengembangkan kurikulum yang berlaku, yang mencakup:

 a. menciptakan dan mempertahankan kondisi dan iklim belajar mengajar yang sesuai.

 b. memberi pengarahan kepada guru-guru tentang cara mengelola kelas.

 c. mengkoordinasi staf pengajar

 d. memberikan informasi pendidikan yang baru

 e. menembangkan program belajar yang sesuai

 f. mengembangkan materi pelajaran bersama guru-guru

 g. mengembangkan model belajar mengajar bersama guru-guru

 h. mengembangkan alat-alat bantu belajar bersama guru-guru

 i. memberi contoh-contoh model belajar mengajar

 j. mengembangkan program pengayaan dan remedy bersama guru-guru

3. meningkatkan pelaksanaan aktivitas penunjang kurikulum yang mencakup:

 a. melakukan penelitian pendidikan bersma guru dan kepala sekolah

 b. mengadakan hubungan dengan masyarakat bersama guru dan kepala sekolah.

**C. Persiapan Dasar Pembelajaran**

*1. Persiapan Mengajar*

Guru sebagai pelaksana pembelajaran diharuskan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya pembelajaran. Persiapan-persiapan sebelum mengajar dikenal dengan perangkat mengajar dan kesiapan dalam jalannya pembelajaran dikenal dengan ketrampilan mengajar. Hamzah B. Uno mengungkapkan, bahwa pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan mengembangkan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada.[[39]](#footnote-40) Lanjut diungkapkan, bahwa istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancang (desain) sebagai upaya membelajarkan siswa.

 Ungkapan Hamzan B. Uno tersebut di atas, menunjukkan bahwa proses belajar mengajar akan dilakukan dengan baik, jika sebelumnya dirancang atau diadakan perencanaan kegiatan pengajaran atau pembelajaran sebab itu, perencanaan atau rancangan pembelajaran sebelum melakukan proses belajar mengajar sangat menentukan tercapainya tujuan. Pentingnya perencanaan terhadap pengajaran dan pembelajaran itu, maka oleh Marno diungkapkan bahwa perencanaan merupakan satu hal yang sangat penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam mencapai suatu tujuan, karena seringkali pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa adanya perencanaan. Kesulitan tersebut dapat berupa penyimpangan arah daripada tujuan, pemborosan modal yang mengakibatkan gagalnya semua kegiatan dalam pencapaian tujuan.[[40]](#footnote-41)

 Karena itu, perencanaan pembelajaran bagi seorang guru sangat bermanfaat. Sebagaimana K. Suhendra mengungkapkan bahwa di antara manfaat perencanaan itu adalah sebagai peramalan terhadap masa datang yang perlu kepastian, sebagai penjamin kepastian tujuan, dan sebagai pedoman pelaksana dan indikator keberhasilan dalam pengawasan dan evaluasi.[[41]](#footnote-42)

 Dengan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa perencanaan atau persiapan perangkat Pembelajaran sangat penting dalam rangka keterarahan, keefektifan dan efisien dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan pembelajaran oleh seorang guru itu adalah pembuatan program tahunan (Prota), pembuatan program semester(Prosem), pembuatan perangkat mengajar (Silabus) dan persiapan batasan mengajar. Inilah yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran, karena tanpa perangkat-perangkat tersebut akan berpengaruh besar terhadap tujaan yang ingin dicapai. Artinya penyajian pengajaran yang diajarkan tidak akan sampai atau kurang dimiliki oleh peserta didik kalau perangkat-perangkat itu tidak dipersiapkan terlebih dahulu oleh seorang guru sebelum mengajar.

 Persiapan perangkat sebelum pelaksanaan pembelajaran itu terdapat beberapa komponen yang sangat penting dan menjadi satu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan sangat menentukan. Komponen-komponen itu harus ditentukan oleh seorang guru dan komponen-komponen itu pula yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran dari awal pertemuan pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Komponen-komponen dimaksud adalah tujuan yang hendak dicapai, penentuan materi, penentuan metode, penentuan waktu efektif, penetapan sumber, penetapan ketrampilan mengajar, dan alat evaluasi.

 Semua perangkat pembelajaran yang telah tertuang dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV tentang Standar Proses Pasal 19 dijelaskan (1) proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, (2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam proses pembelajaran pendidikan memberikan keteladanaan, (3) setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efekif dan efisien. Sedangkan pada pasal 20 dijelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.[[42]](#footnote-43)

 Hamzah B. Uno mengungkapkan bahwa guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan pembelajaran dengan memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran yang meliputi; (1) membuat dan merumuskan TIK, (2) menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan dan kemampuan siswa, komprehensip, sistematis, dan fungsional efektif, (3) merancang metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, (4) menyediakan sumber belajar, dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan (5) media, dalam hal ini guru berperan sebagai mediator dengan memperhatikan relevansi, efektif dan efisien, kesesuaian dengan metode, serta pertimbangan praktis. Lebih lanjut diungkapkan bahwa dengan waktu yang sangat sedikit atau terbatas tersebut, guru dapat merancang dan mempersiapkan semua komponen agar berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang prinsip-prinsip belajar, sebagai landasan perencanaan.[[43]](#footnote-44)

 H. Khaeruddin *et.Al* mengungkapkan bahwa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yaitu : Kompetensi Dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Lebih lanjut H. Khaeruddin dkk mengungkapkan bahwa format silabus berbasis KTSP minimal mencakup (1) kompetensi dasar, (2) materi pokok/pembelajaran, (3) kegiatan pembelajaran, (4) indikator, (5) penilaian, (6) alokasi waktu, dan (7) sumber belajar.[[44]](#footnote-45) Sedangkan H. Muhaimin mengatakan bahwa Silabus dan RPP merupakan wujud rencana profesional yang disusun dan dikembangkan para guru. Mengembangkan dan menyusun silabus merupakan tugas dan tanggungjawab profesional setiap guru mata pelajaran. Silabus dan RPP yang baik akan dapat diimplementasikan secara tepat dan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran secara terus menerus. Karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan kondisi sekolah mereka. Silabus memuat sekurang-kurangnya komponen-komponen (1) identitas silabus, (2) standar kompotensi, (3) materi pokok, (4) kegiatan pembelajaran, (5) indikator), (6) penilaian, (7) alokasi waktu, (8) sumber belajar. Sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus.[[45]](#footnote-46) Lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri dari dari 1 (satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih.

*2. Keterampilan Dasar Mengajar*

Keterampilan-keterampilan mengajar *(teaching skill)* harus dikuasai oleh guru secara benar pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Keterampilan mengajar itu punya peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan. Karena itu, keterampilan mengajar terkait erat dengan pelaksanaan penyampaian pengajaran. Paling tidak ada 8 titik keterampilan dasar mengajar.[[46]](#footnote-47) Delapan keteramplan dasar itu adalah;a. Keterampilan bertanya. b.Keterampilan memberi penguatan. c. Keterampilan menjelaskan. d. Keterampilan membuka dan menutup pengajaran. e.Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. f. Keterampilan mengelola kelas. g.Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan

 Kesiapan guru di sekolah utamanya kepala sekolah dan guru-gurunya sebagaimana ungkapan di atas menurut Soedjarto dalam bukunya Ahmad Azhari dijelaskan tujuh kemampuan yang harus dimiliki guru, yakni; (1) memahami peserta didik dengan latar belakangnya dan kemampuannya, (2) menguasai disiplin ilmu sebagai sumber belajar, (3) menguasai bahan belajar, (4) memiliki wawasan kependidikan yang mendalam, (5) menguasai rekayasa dan teknologi pendidikan, (6) memahami tujuan dan filsafat Pendidikan Nasional, (7) berkepribadian dan berjiwa Pancasila.”[[47]](#footnote-48) Hendyat Soetopo dan Wasty menjelaskan pula bahwa untuk dapat melaksanakan pengajaran, guru perlu memiliki banyak pengalaman serta perkembangan profesinya di bidang pengajaran. Guru senantiasa terus belajar atau menambah pengalaman guna mengimbangi kemajuan ilmu dan teknologi dalam pertumbuhan masyarakat. Sebagai anggota unit kerja, guru tak bisa bekerja sendiri, terpisah dari orang-orang lain . [[48]](#footnote-49)

*3. Urgensi Pembinaan Profesi Guru*

Ada beberapa Pengertian profesi , salah satu di antaranya tenaga kependidikan, termasuk guru. Secara umum, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut. Di dalam sains dan teknologi, digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplemen-tasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dalam aplikasinya, menyangkut aspek-aspek yang lebih bersifat mental daripada yang bersifat manual work. Pekerjaan profesional akan senantiasa menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan demi kemaslahatan orang lain.[[49]](#footnote-50)

 Dalam hal ini, di samping kecermatan untuk menentukan langkah, guru juga harus sabar, ulet, dan telaten serta tanggap terhadap setiap kondisi, sehingga di akhir pekerjaannya akan membuahkan suatu hasil yang memuaskan.

 Pembinaan profesi penting dilakukan dalam bentuk pendidikan *in-service* atau pendidikan dalam jabatan bagi para guru, karena keberadaannya tidak terlepas dengan pendidikan *pre-service*. Pada hakikatnya pendidikan *in-service* merupakan kelanjutan pendidikan *pre-service* yang ditempuh oleh para guru sebelum mereka diangkat dan berfungsi sebagai tenaga pengajar. Pendidikan *in-service* bagi para guru perlu dilakukan, karena berpijak pada kenyataan bahwa pendidikan *pre-service* masih mengandung kelemahan sehingga masih harus disempurkana dalam menyiapkan para guru dalam mengajar.

 Upaya untuk mencari kondisi ideal atau tenaga kependidikan yang profesional tersebut harus tetap diupayakan. Secara teoritik, upaya itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dari pihak tenaga kependidikan sendiri dan dari pihak luar. Dari pihak tenaga kependidikan sendiri, dia harus benar-benar memiliki motif, tekad, dan semangat yang sangat besar untuk mengabdi dan melaksanakan tugas mendidik dan mengajar bagi bangsanya. Harus pula memiliki kesadaran bahwa profesi guru adalah profesi yang paling luas cakupan, garapan, dan tanggungjawab dari seluruh profesi dan dasar bagi seluruh profesi lainnya. sedangkan dari pihak luar, maksudnya adalah peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan yang dilakukan oleh para pemegang kebijakan, dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) pelatihan dan pengembangan, (2) pendidikan.[[50]](#footnote-51)

1. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1991) hlm. 374. [↑](#footnote-ref-2)
2. Tim Pakar Manajemen Pendidikan, 2004,hlm. 53. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad Azhari, *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*, (Rian Putra, Jakarta, 2003) hlm. 5. [↑](#footnote-ref-4)
4. Subari*, Supervisi Pendidikan, Dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar* ( Jakarta: Bumi Aksara, 1994),hlm. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Hendayat Soetopo,*Manajemen Pendidikan: Bahan Kuliah Manajemen Pendidikan bagi Mahasiswa* S2 UIN Malang Program Pascasarjana, (Malang, 2001) hlm. 75. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, hlm1. [↑](#footnote-ref-7)
7. N.A. Amentembun, *Supervisi Pendidikan: Penuntun bagi para Penilik Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru*, (Bandung;Suri Bandung, 1981) hlm.1. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*.hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-9)
9. Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran, dalam Profesi Pembelajaran*, (Bandung, Alfabeta, 2010) hlm. 91. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibrahim Bafadal*, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*( Jakarta:Bumi Aksara, 1992) hlm.2. [↑](#footnote-ref-11)
11. N.A. Amenetembun, *Supervisi pendidikan: Penuntun bagi para penilik Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru,* (Suri Bandung, 1981) hlm. 6. [↑](#footnote-ref-12)
12. Tatang S. *Supervisi Pendidikan*,( Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 58. [↑](#footnote-ref-13)
13. Luk-Luk Nur Mufidah*, Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Sukses, 2009) hlm.18-19. [↑](#footnote-ref-14)
14. Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di era Otonomi Daerah,* (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm.37. [↑](#footnote-ref-15)
15. Hendayat Soetopo,*Manajemen Pendidikan*,(Malang, 2001) hlm.77. [↑](#footnote-ref-16)
16. Daryanto dan Tutik Rahmawati, *Supervisi Pembelajaran,(*Yogyakarta, Gava Media, 2015) hlm.7 [↑](#footnote-ref-17)
17. B. Simanjuntak, *Didaktik dan Metodik*, (Bandung; Transito, 1986) hlm.180 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*, hlm 112. [↑](#footnote-ref-19)
19. Amentembun*,Supervisi pendidikan*, (Bandung; Suri Bandung, 2007) hlm.59 [↑](#footnote-ref-20)
20. Hendayat Soetopo*, Manajemen Pendidikan : Bahan Kuliah Manajemen Pendidkan bagi Mahasiswa S2, UIN Malang Program Pascasarjana*: (Malang, 2001) hlm.78. [↑](#footnote-ref-21)
21. N.A. Amentembun*, Supervisi Pendidikan*, (Suri Bandung, 1981) hlm.48. [↑](#footnote-ref-22)
22. N.A. Amentembun*, Supervisi Pendidikan*, (Suri Bandung, 1981), hlm.51-53. [↑](#footnote-ref-23)
23. Panduan Tugas Fungsional Pengawas. Depertemen Agama RI,( Jakarta, 2000), hlm.21. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ahmad azhari*, Supervisi Rencana Program Pembelajaran,* (Ciputat;Rian Putra, 2004) hlm.8 [↑](#footnote-ref-25)
25. Poerwadarminta*, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 1976) hlm. 58. [↑](#footnote-ref-26)
26. Prayudi, 1981, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-27)
27. Kemenag RI, tahun 2012, hlm.19-23. [↑](#footnote-ref-28)
28. Kemenag RI, 2012, hlm.23. [↑](#footnote-ref-29)
29. Daryanto dan Tutik Rachmawati*, Supervisi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015) hlm. 32 [↑](#footnote-ref-30)
30. Syaiful Sagala, *Supervisi pembelajaran,* (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm.106. [↑](#footnote-ref-31)
31. Jasmani dan Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan,* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).hlm. 132-134. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*,hlm.134. [↑](#footnote-ref-33)
33. B. Simanjuntak, *Didaktik dan Metodik*, (Bandung: Transito, 1986) hlm.25. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ngalim Purwanto*, Administrasi dan Supervisi Pendidikan***,(**Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 86, [↑](#footnote-ref-35)
35. Akmal Hawi. *Kompetensi Guru PAI, (*Palembang;IAIN Raden Fatah Press, 2008) hlm. 1. [↑](#footnote-ref-36)
36. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta; Balai Pustaka, 1991) hlm.516. [↑](#footnote-ref-37)
37. Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran*, (Bandung; Al-fabeta, 2010) ,hlm.161. [↑](#footnote-ref-38)
38. Made Pidarta*, Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*, (Jakarta:bumi Aksara, 1992) hlm.100-101. [↑](#footnote-ref-39)
39. Hamzah.B. Uno*. Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm.2. [↑](#footnote-ref-40)
40. Marno, *Islam by Managemen and Leadhership*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007) hlm.20. [↑](#footnote-ref-41)
41. K. Suhendra, *Manajemen Organisasi dala Realita Kehidupan*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm. 40. [↑](#footnote-ref-42)
42. Depertemen Agama RI, 2000,hlm.164. [↑](#footnote-ref-43)
43. Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm.23. [↑](#footnote-ref-44)
44. Khaerudin*,et.Al, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ;Konsep dan Implementasinya di Madrasyah,* (Jawa Tengah: Pilar Media, 2007) hlm.137. [↑](#footnote-ref-45)
45. Muhaimin, *Materi Kuliah Manajemen Mutu Pendidikan Islam*, (Pascasarjana UIN Malang, 2008) hlm.37. [↑](#footnote-ref-46)
46. M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995) hlm. 74. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ahmad Azhari, *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*, (Ciputat; Rian Putra, 2004) hlm.28 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid*,hlm.58 [↑](#footnote-ref-49)
49. Sudirman, *Pembinaan Profesi Guru*, (Jakarta, 2001) hlm.132. [↑](#footnote-ref-50)
50. Agus Maimun,*et.Al:* *Profil Pendidikan Agama Islam (Model pada Sekolah Umum Tingkat Dasar ) , (*Jakarta, 2003) hlm.51. [↑](#footnote-ref-51)